

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **V.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kondisi PMDN, pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan konsumsi rumah tangga memiliki nilai optimal terhadap pembangunan manusia pada beberapa klaster, yaitu Klaster Kalimantan Timur, Klaster Jawa Tengah, Klaster Jawa Barat dan Klaster Jawa Timur, dan Klaster DKI Jakarta. Hal ini menjelaskan bahwa kondisi PMDN, pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan konsumsi rumah tangga mampu mendorong pembangunan manusia sejalan dengan upaya Pembangunan Indonesia. Kondisi PMDN, pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan konsumsi rumah tangga yang optimal didukung oleh program pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan PMDN, pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan konsumsi rumah tangga. Beberapa kebijakan pemerintah yang mendorong pencapaian kondisi optimal antara lain:

1. Penanaman Modal Dalam Negeri, Menyederhanakan proses perizinan usaha melalui sistem online dan offline yang transparan, efisien, dan akuntabel telah berhasil dalam mempermudah para investor untuk menanamkan modalnya untuk berinvestasi di wilayah Indonesia.
2. Pertumbuhan Ekonomi, Mengidentifikasi sektor-sektor unggulan yang memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti industri manufaktur, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
3. Upah Minimum, Memperhatikan faktor-faktor ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan produktivitas tenaga kerja dalam menetapkan upah minimum.
4. Konsumsi Rumah Tangga, Menjaga distribusi pangan yang merata ke seluruh wilayah di Indonesia, termasuk daerah-daerah yang sulit dijangkau dan pemerintah juga mengupayakan aksesibilitas pangan yang baik dan berkualitas, terutama masyarakat yang berada di daerah terpencil atau mereka yang berpendapatan rendah.

Pendidikan masyarakat yang lebih tinggi akan meningkatkan kemampuan untuk melakukan pengawasan, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan menyimpang yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daerah. Hal ini didasarkan pada korelasi antara IPM provinsi yang optimal dengan tingkat korupsi di wilayah tersebut yang menunjukkan hasil negatif.

Dengan demikian, Pemerintah daerah diharapkan untuk dapat terus melakukan evaluasi terkait program yang telah dilaksanakan guna mempertahankan serta meningkatkan PMDN, pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan konsumsi rumah tangga yang dapat berdampak positif terhadap peningkatan pembangunan manusia yang berkualitas.

## V.2 Saran

### 1. Aspek Teoritis

- a. Disarankan untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan kombinasi variabel-variabel yang berbeda agar dapat menjelaskan pengaruh variabel lain yang mempengaruhi pembangunan manusia.
- b. Penggunaan teknik analisis keberlanjutan dengan metode QCA dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya agar dapat menemukan variabel-variabel yang memiliki nilai optimal untuk mempengaruhi outcome.

### 2. Aspek Praktis

Pada penelitian ini, PMDN, pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan konsumsi rumah tangga memiliki nilai optimal terhadap outcome yaitu pembangunan manusia. Kondisi PMDN, pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan konsumsi rumah tangga menggambarkan bahwa wilayah yang optimal berada pada Klaster Kalimantan Timur, Klaster Jawa Tengah, Klaster Jawa Barat dan Klaster Jawa Timur, dan Klaster DKI Jakarta. Hal ini menandakan bahwa program yang berkaitan dengan upaya peningkatan PMDN, pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan konsumsi rumah tangga

melalui peran yang diterapkan pemerintah daerah di klaster tersebut telah memberikan hal positif dalam mendukung peningkatan pembangunan manusia sehingga hal ini memberikan referensi bagi wilayah-wilayah lainnya dalam mengatasi permasalahan PMDN, pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan konsumsi rumah tangga di daerahnya. Pada wilayah optimal dengan status IPM tinggi harus dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di wilayah dengan pendidikan yang didapat dan kesadaran diri. Dalam rangka mendorong dan menstimulasi peningkatan pembangunan manusia yang berkualitas dan kebijakan anti-korupsi yang sejalan dengan upaya peningkatan produktivitas yang dapat mendukung pembangunan nasional, pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan penilaian atas tujuan dan kebijakan yang ingin dicapai di masa depan.